

LAMPIRAN

Lampiran 1 Mapping Penelitian Terdahulu

I	II	III	IV	V	VI
(Penulis, Judul, Tahun)	Abstrak	Tujuan Penelitian	Variabel	Metodelogi	Hasil dan Pembahasan
1. siti Noor Mawaddah Rohmah, Husnurosyidah Analisis pengelolaan aset tetap daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) KABUPATEN PATI 2023	Pengelolaan aset tetap daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Metode yang	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan aset tetap daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) KABUPATEN PATI	Analisis pengelolaan aset tetap daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) KABUPATEN PATI	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah di BPKAD Kabupaten Pati telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah. Pemanfaatan aset daerah saat ini hanya mencakup sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama Build Operate Transfer (BOT),

	digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap di BPKAD				padahal menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 seharusnya juga meliputi pinjam pakai, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Kendala utama yang dihadapi adalah masih adanya tanah yang belum bersertifikat serta dokumen aset yang kurang lengkap pada pihak ketiga pengguna gedung. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan percepatan pengurusan sertifikat tanah serta perbaikan kelengkapan dokumen aset.
--	---	--	--	--	---

2. Anjes Faresh Faisal, Mia Rosmiati Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatka n Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang) Indonesian Accounting Research Journal 2022	Pengelolaan aset daerah di Kabupaten Subang masih menjadi temuan masalah bagi BPK, khususnya pada aset tetap berupa tanah dan bangunan yang belum bersertifikat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset	Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang)	Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang)	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah Kabupaten Subang pada bagian penatausahaan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pengembangan aplikasi ATISISBADA, optimalisasi koordinasi dan komunikasi, serta masalah seringnya pergantian pegawai. Pemerintah Kabupaten Subang telah melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain dengan
--	---	---	---	--	--

daerah di Pemerintah Kabupaten Subang masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya kualitas kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola barang milik daerah, serta koordinasi dan komunikasi yang belum optimal. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Subang terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memberikan bimbingan teknis kepada pegawai pengelola barang serta menindaklanjuti temuan- temuan BPK.				memberikan bimbingan teknis kepada pegawai, kepala bidang, dan kepala subbidang, melaksanakan rapat koordinasi triwulan untuk membahas permasalahan, serta memberikan reward bagi pegawai berprestasi. Selain itu, pemerintah daerah juga secara konsisten menindaklanjuti temuan BPK agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih baik dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap dapat dipertahankan.
---	--	--	--	---

3. Rizka Amalia Saadah, Nuwun Priyono Analisis Implementasi Siklus Dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap Di BPKAD Kota Magelang Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI) 2020	Aset tetap adalah suatu elemen yang wajib dikelola secara benar untuk membuahk informasi yang tepat di wilayah laporan keuangan. Tujuannya adalah guna mengetahui keselarasan pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang terhadap Permendagri No.19 Tahun 2016 yang dapat diamati melalui siklus dan prosedur pengelolaan barang milik daerah dan kelengkapan dokumen sumbernya. Jenis penelitian yang	Tujuan penelitian ini menganalisis Implementasi Siklus Dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap Di BPKAD Kota Magelang	Analisis Implementasi Siklus Dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap Di BPKAD Kota Magelang	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap yang dimiliki oleh Kota Magelang meliputi tanah, bangunan, gedung, kendaraan bermotor, dan aset lainnya. Pengelolaan aset tetap oleh BPKAD Kota Magelang telah dilaksanakan sesuai dengan siklus dan prosedur yang diatur dalam Permendagri No.19 Tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan sumber dokumen serta pelaksanaan
--	--	---	---	---	--

	diaplikasikan pada penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan jika BPKAD Kota Magelang sudah menerapkan 15 siklus pada pengelolaan aset tetap. Dan kelengkapan sumber dokumen sudah lengkap alhasil pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Magelang terhadap Permendagri No. 19 tahun 2016 sudah seluruhnya sesuai.				siklus dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset tetap di Kota Magelang telah berjalan optimal dan sesuai regulasi
--	---	--	--	--	---

4. Mela Devita, Nuri Aslami Analisis pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kabupaten labuhanbatu JOSR: Journal of Social Research 2022	Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan fungsi khusus yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aset daerah merupakan bagian dari kekayaan pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur kemampuan setiap instansi pemerintah dalam	Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kabupaten labuhanbatu	Analisis pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kabupaten labuhanbatu	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu tentang Analisis Manajemen Aset Tetap. Berikut hasil penelitian Labuhanbatu tentang Analisis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD):Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan pola pengelolaan yang baik yang dimulai dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC), namun implementasinya masih belum ideal.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemanfaatan barang milik
---	--	---	--	--	--

	mengelola aset daerah sesuai peraturan yang berlaku. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan sebagai pengguna sekaligus pemanfaat aset daerah untuk mendukung keberlangsungan program kerja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, kelengkapan data, serta				daerah belum optimal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 karena belum semua kegiatan pemanfaatannya selesai. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah melakukan segala upaya untuk meningkatkan pengelolaan barang milik daerah, antara lain peningkatan kinerja dengan menerjunkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan analisis jabatan, penetapan kebijakan, dan penggunaan kekayaan daerah.
--	---	--	--	--	---

	permasalahan yang muncul dalam pengelolaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aset daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum optimal karena tidak semua kegiatan pemanfaatan dapat dijalankan secara maksimal.				
--	--	--	--	--	--

5. Gilang Ramandani, Wirawan Suhaedi Management of Fixed Asset Management at the Regional Finance Agency of Mataram City Journal of Universal Studies 2025	Penelitian ini berfokus pada praktik pengelolaan aset tetap di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram dengan menyoroti tantangan dan keberhasilan dalam pengelolaan aset sesuai dengan peraturan pemerintah. Penelitian menilai efisiensi proses pengelolaan aset yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan dalam kerangka Permendagri No. 47 Tahun 2021. Hasil	Penelitian ini bertujuan menganalisis Manajemen Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	Manajeme n Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	Metode Penelitian Menggunak an Metode Kualitatif	Hasil pebelitian menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mengelola aset tetap pemerintah daerah dengan pembagian tugas pada beberapa sub-bidang, seperti Analisis Kebutuhan, Anggaran dan Perbendaharaan, Keamanan, serta Administrasi. Pengelolaan aset tetap meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan an, penghapusan, dan administrasi, dengan fokus utama pada kegiatan pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan. Penerbitan Permendagri Nomor 47 Tahun
---	--	--	--	--	---

	penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses pengelolaan aset secara umum sudah sesuai dengan ketentuan, masih terdapat kendala seperti kesalahan input pembukuan, kesulitan dalam penentuan nilai aset, serta ketidaksesuaian antara data laporan dengan kondisi riil. Penerapan Permendagri No. 47 Tahun 2021 terbukti membawa dampak positif, namun masih diperlukan peningkatan terutama pada kesadaran				2021 memberikan dampak positif karena menghadirkan pedoman yang jelas, meskipun masih terdapat kendala berupa kesalahan input pembukuan, kesulitan menentukan nilai aset, dan ketidaksesuaian antara data laporan dengan kondisi riil. Penelitian ini terbatas pada BKD Kota Mataram tanpa kunjungan langsung ke lapangan, serta hanya berfokus pada satu daerah sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan mencakup kunjungan lapangan untuk
--	--	--	--	--	---

	aparatur dan ketepatan data. Oleh karena itu, pelatihan aparatur serta integrasi lebih lanjut dengan sistem digital sangat dibutuhkan guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, dan pengelola aset dalam upaya meningkatkan sistem pengelolaan aset serta mewujudkan transparansi keuangan di lingkungan pemerintahan daerah				menilai kondisi riil aset, memperluas cakupan wilayah, serta mengeksplorasi pemanfaatan alat digital guna meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan aset
--	---	--	--	--	--

6. La Devi, Yunarsi,Andria ni Saputri Fixed Asset Management at The Regional Finance And Asset Agency International Jornal Of Multidiciplinary Leainers 2024	Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi, status kepemilikan, dan legalitas aset di BKAD Kabupaten Buton Selatan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan jumlah aset dari 2018 hingga 2020, namun terdapat perbedaan antara pencatatan administrasi dengan kondisi fisik aset, terutama pada aset rusak berat. BKAD juga mendukung kebijakan penggantian aset tanpa perbaikan yang memberikan dampak positif terhadap kualitas aset,	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Manajemen Aset Tetap di Badan Keuangan dan Aset Daerah	Manajeme n Aset Tetap di Badan Keuangan dan Aset Daerah	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan signifikan jumlah aset pada BKAD Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2018 hingga 2020. Namun, terdapat perbedaan antara kondisi aset yang dilaporkan dengan kondisi fisik sebenarnya, terutama pada aset yang rusak berat dan dalam kondisi kurang baik. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara pencatatan administrasi dan kondisi riil aset. Kebijakan penggantian aset tanpa melalui perbaikan memberikan dampak positif terhadap kualitas
--	---	--	---	---	---

	meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal efisiensi jangka panjang dan kebermanfaatan aset.				aset yang tersedia serta berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kondisi aset. Alasan utama tidak dilakukan perbaikan adalah karena tingginya biaya pemeliharaan yang mempengaruhi keputusan penggantian, sehingga kebijakan ini dinilai berdampak positif terhadap laporan keuangan daerah.
--	---	--	--	--	--

7. Dena Handayani, Nunuy Nur Afiah, Ivan Yudianto	Evaluasi pengamanan aset tetap tanah di BKAD Kota Bogor dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis Champion, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor No. 114 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan aset tanah telah sesuai dengan ketentuan, namun masih terbatas pada aspek administratif. Hambatan utama berasal dari faktor internal dan eksternal, seperti kompetensi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi Pengamanan Aset Tetap Tanah Dalam Rangka Menciptakan Barang Milik Daerah Yang Tertib (Studi Kasus BKAD Kota Bogor)	Evaluasi Pengamanan Aset Tetap Tanah Dalam Rangka Menciptakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tertib (Studi Kasus BKAD Kota Bogor)	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan aset tetap tanah di BKAD Kota Bogor sudah sesuai dengan Perwali Kota Bogor No. 114 Tahun 2020 Pasal 102–105 dengan tingkat kesesuaian 100%. Dari tiga bentuk pengamanan (fisik, administrasi, dan hukum), hanya pengamanan administrasi yang sepenuhnya mencakup seluruh aset tanah milik Pemkot Bogor. Pengamanan administrasi berperan penting karena menjadi dasar tertib pengelolaan, pengumpulan, penyusunan, dan pelaporan dokumen aset. Namun, masih
--	---	---	---	---	---

	SDM, komunikasi dengan pihak eksternal, sengketa lahan, digitalisasi aset, serta kesalahan manusia. Penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi BKAD Kota Bogor dalam memperbaiki sistem pengamanan aset serta sebagai kontribusi ilmiah dalam pengelolaan aset daerah				terdapat kendala baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan kompetensi SDM, lemahnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak luar, sengketa aset, digitalisasi yang belum optimal, serta human error. Untuk mengatasi hambatan tersebut, direkomendasikan solusi berupa peningkatan kolaborasi eksternal, pelatihan SDM, pengembangan aplikasi digital, serta rekonsiliasi dan pembaruan data aset secara berkelanjutan.
--	---	--	--	--	--

8. Lita Chairunnisa , Arnida Wahyuni Lubis Analisis Pengelolaa n Aset pada Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kota Medan Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) 2024	Setiap uang atau aset berwujud atau tidak berwujud yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi bisnis dan yang nilainya akan menguntungkan mereka semua di masa depan dianggap sebagai aset. Pengelolaa n asset modal daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, dan nilai tambah pengelolaan aset. Pengelolaan aset daerah yang efektif sangat penting untuk mengubahnya menjadi modal yang membantu pertumbuhan pemerintah daerah. Selain untuk mengkaji	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi s Pengelolaan Aset pada Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kota Medan	Analisis Pengelolaa n Aset pada Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kota Medan	Metode Penelitian Menggunaka n Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset di Provinsi Sumatera Utara telah berlandaskan pada PERMENDAGR I No. 19 Tahun 2017, Perda No. 4 Tahun 2016, dan Pergub No. 49 Tahun 2017, dengan BPKAD sebagai OPD utama. Secara umum, pengelolaan aset telah dilaksanakan sesuai siklus yang ditetapkan, namun masih ditemukan kelemahan pada tingkat pengguna barang, seperti peminjaman tanpa dokumentasi resmi dan penggunaan kendaraan di luar ketentuan. Pada Dinas Kesehatan
--	---	---	---	--	---

	kelengkapan sumber dan sudut pandang, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemantauan aset pada Dinas Kesehatan Kota Medan dengan pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian semacam ini. Dinas Kesehatan Kota Medan merupakan tempat penelitian ini dilakukan.				Kota Medan, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan aset yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar sesuai dengan peraturan dan meningkatkan akuntabilitas.
--	--	--	--	--	--

9. Esduo Ramadhano Labasido , Darwanis Analisis pengelolaan aset tetap daerah pada dinas pengelolaan keuangan aset daerah (DPKAD) provinsi aceh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 2019	Aset tetap merupakan salah satu elemen yang harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan barang milik daerah (aset tetap) yang tertib berpengaruh signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Aceh dengan Peraturan	Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan aset tetap daerah pada dinas pengelolaan keuangan aset daerah (DPKAD) provinsi aceh	Analisis pengelolaan aset tetap pada dinas pengelolaan keuangan aset daerah (DPKAD) provinsi aceh	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aceh merupakan salah satu daerah/wilayah yang memiliki asset tetap, contohnya berupa tanah, bangunan, gedung, kendaraan bermotr dan lain sebagainya. 2) Praktik pengelolaan aset tetap pemerintah daerah oleh DPKAD Aceh belum sepenuhnya mengikuti Permendagri No.19 Tahun 2016, seperti masih adanya beberapa dokumen sumber pengelolaan aset tetap yang DPKAD Aceh tidak di miliki.
--	--	---	--	---	--

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, ditinjau dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumber. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPKAD Aceh sebagai pengelola barang telah melaksanakan 10 siklus dalam pengelolaan aset tetap.					
--	--	--	--	--	--

10. Rinat A. Zhanbayev , Albina Y. Yerkin , Anna V. Shutaleva , Muhammad Irfan , Kakhaberi Gabelashvili , G. R. Temirbaeva , Irina Yu. Chazova 10 and Rimma State asset management paradigm in the quasi-public sector and environmental sustainability: Insights from the Republic of Kazakhstan (Frontiers in Environmental Science) 2023	meningkatkan regulasi dan administrasi negara terhadap sektor kuasi-publik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Republik Kazakhstan dalam kerangka paradigma keberlanjutan sosial. Penelitian ini dilakukan karena adanya kebutuhan untuk mencari keseimbangan antara kepentingan bisnis, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta pelestariannya dalam skala global. Permasalahan terkait pengelolaan aset negara diidentifikasi dan cara penyelesaiannya	Penelitian ini bertujuan menganalisis Paradigma pengelolaan aset negara di sektor kuasi-publik dan keberlanjutan lingkungan Wawasan dari Republik Kazakhstan	Paradigma pengelolaan aset negara di sektor kuasi-publik dan keberlanjutan lingkungan Wawasan dari Republik Kazakhstan	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara pada sektor kuasi-publik di Republik Kazakhstan belum optimal karena lemahnya kerangka kelembagaan, rendahnya efisiensi keuangan, dan dominasi tinggi peran negara. Reformasi diperlukan melalui transformasi struktur kelembagaan, peningkatan disiplin keuangan, transparansi, serta pembaruan model tata kelola. Analisa
---	--	--	--	---	---

diajukan berdasarkan metodologi corporate foresight dengan menggunakan mekanisme perencanaan strategis. Hasil analisis terhadap berbagai instrumen yang diterapkan oleh perusahaan transnasional terkemuka menunjukkan arah utama yang perlu diambil untuk menata dan mengoptimalkan sektor kuasi-publik di Republik Kazakhstan. Artikel ini menyajikan usulan untuk meningkatkan regulasi dan administrasi perusahaan kuasi-publik di Republik				s juga menemukan bahwa perusahaan kuasi-publik seharusnya tidak menggandakan fungsi negara, melainkan memperkuat kemitraan publik-swasta, menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan efisiensi korporasi, serta mendorong pengembangan UKM dan sektor terkait. Dengan strategi ini, sektor kuasi-publik dapat berkontribusi lebih efektif terhadap pembangunan berkelanjutan dan penguatan perekonomian
--	--	--	--	--

	Kazakhstan. Hasil penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan, pakar, dan pemangku kepentingan dalam memahami permasalahan tersebut sekaligus meningkatkan praktik keberlanjutan				nasional.
--	--	--	--	--	-----------

11. Aily Rohmi Alfiana,M.Irwan,Siti Fatimah Analysis of Regional Fixed Asset Management in Supporting Regional Original Income (PAD) in Central Lombok Regency 2013- 2022 (indosian development economics and localities) 2025	pengelolaan aset tetap daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2013–2022. Fokus utama penelitian ini adalah mengukur kontribusi, efektivitas, dan efisiensi pemanfaatan aset tetap serta menelaah bagaimana pengelolaan aset tetap dilaksanakan . Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik	Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Tengah 2013- 2022	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013- 2022	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pemanfaatan aset tetap daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah pada periode 2013– 2022 menunjukkan kecenderungan fluktuatif dan rendah, dengan rata-rata hanya 4,29% atau masuk kategori sangat rendah. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 29,45%, sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2021 hanya 0,56%. Dari sisi efektivitas, rata- rata capaian sebesar 72,33% yang dikategorikan kurang efektif,
---	--	--	---	---	---

	analisis kontribusi, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap PAD berdasarkan data laporan realisasi anggaran dan neraca aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan dari pemanfaatan aset tetap terhadap PAD tahun 2013–2022 memiliki rata-rata yang sangat rendah, masih relatif rendah, dan bersifat fluktuatif. Tingkat efektivitas pendapatan pemanfaatan				dengan tingkat tertinggi di tahun 2020 (119,97%) dan terendah di tahun 2021 (8,14%). Sementara itu, tingkat efisiensi rata-rata sebesar 87,29% yang tergolong cukup efisien, dengan capaian terbaik pada tahun 2020 (2,51%) dan terburuk pada tahun 2021 (509,41%). Secara umum, pengelolaan aset tetap daerah di Kabupaten Lombok Tengah belum optimal dalam mendukung PAD. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi pencatatan aset yang kurang baik, efektivitas pemanfaatan yang rendah, serta tingginya
--	---	--	--	--	---

aset tetap pada periode tersebut secara rata-rata tergolong kurang efektif, sedangkan tingkat efisiensi pemanfaatan aset tetap tergolong cukup efisien. Tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset juga belum optimal karena rendahnya kualitas pengelolaan, minimnya pemeliharaan, serta kurangnya ketepatan dalam inventarisasi aset. Beberapa permasalahan yang				biaya pemeliharaan yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Untuk meningkatkan kontribusi aset terhadap PAD, dibutuhkan strategi berupa perbaikan inventarisasi, optimalisasi pemanfaatan melalui kerja sama dengan sektor swasta, serta regulasi yang lebih jelas dan terstruktur. Selain itu, pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan sektor unggulan, khususnya pariwisata, serta membangun Sistem Informasi Manajemen
---	--	--	--	---

	ditemukan meliputi aset yang belum memiliki legalitas jelas, pencatatan yang tidak sesuai dengan klasifikasi, serta pemanfaatan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan aset tetap yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD serta mendukung kemandirian fiskal daerah				Aset Daerah (SIMDA BMD) digital guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan aset.
--	--	--	--	--	---

12. Maria Paula Wambrauw, Abdul Halim Analisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura) Accounting and business information sytems Journal 2020	penatausahaan aset tetap kendaraan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap	Penelitian ini bertujuan menganalisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura)	Analisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura)	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui SIMDA BMD pada Pemerintah Kota Jayapura mencapai 70% dan termasuk kategori “sesuai” dengan peraturan, sedangkan 30% masih belum sesuai karena adanya dokumen hibah yang tidak lengkap, pencatatan KIB belum tepat, pencatatan mutasi kurang tertib, serta ketiadaan daftar usulan penghapusan barang. Permasalahan penatausahaan
--	---	--	---	---	---

	kendaraan dinas meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan melalui SIMDA BMD sebesar 70%, sehingga masuk dalam kategori “sesuai”. Permasalahan penatausahaan ditemukan dari lima sisi, yaitu administrasi, keuangan, birokrasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Dari sisi administrasi, kendala muncul akibat ketidaklengkapan dokumen dan ketidakjelasan temuan penghapusan aset; dari sisi keuangan, hambatan berupa keterbatasan anggaran serta adanya pelimpahan dan penyelewengan biaya			aset ditemukan dari lima sisi, yaitu administrasi (dokumen tidak lengkap dan ketidakjelasan temuan penghapusan), keuangan (keterbatasan anggaran, pelimpahan, dan penyalahgunaan biaya pemeliharaan), birokrasi (ketiadaan payung hukum, keterbatasan tanggung jawab BPKAD, dan pengadaan kendaraan dinas yang tidak terpusat), sumber daya manusia (tingginya mutasi pegawai dan keterbatasan
--	--	--	--	---

	pemeliharaan; dari sisi birokrasi, hambatan berupa ketiadaan payung hukum, keterbatasan tanggung jawab BPKAD, dan pengadaan kendaraan yang tidak terpusat; dari sisi sumber daya manusia, kendala terkait tingginya tingkat mutasi pegawai dan keterbatasan jumlah SDM; sedangkan dari sisi sistem informasi, permasalahan muncul karena SIMDA BMD masih bersifat offline dan belum terintegrasi dengan bagian keuangan BPKAD.				SDM), serta sistem informasi (SIMDA BMD masih offline dan belum terintegrasi dengan bagian keuangan BPKAD).
--	---	--	--	--	--

13, Nuria Simelio, Francisco JavierHerrero Gutiérrez, Pedro Molina Rodríguez- Navas Analisis akuntabilitas pemindahtanga nandan penghapusan barang milik daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPAKD) provinsi Bali JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI UNIVERSITA S SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT) 2020	Barang milik daerah perlu dikelola secara tertib untuk mendukung otonomi daerah, salah satunya melalui pemindahtangan dan penghapusan barang yang sudah tidak digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lima informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Provinsi Bali telah memenuhi akuntabilitas hukum, kejujuran,	Penelitian ini bertujuan menganalisis Analisis akuntabilitas pemindahtangan nandan penghapusan barang milik daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPAKD) provinsi Bali	Analisis akuntabilitas pemindahtangan nandan penghapusan barang milik daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPAKD) provinsi Bali	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah di BPKAD Provinsi Bali telah memenuhi akuntabilitas hukum, kejujuran, dan kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan dana publik yang bebas dari KKN serta kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yang berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui setoran hasil
---	---	---	---	---	--

	dan kebijakan, namun akuntabilitas proses dan program belum terpenuhi. Oleh karena itu, Sub Bidang Pemindahtanganan disarankan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, memberikan penjelasan prosedur kepada pemohon hibah, serta memperjelas kondisi barang kepada peserta lelang				penjualan aset. Namun, akuntabilitas proses dan program belum sepenuhnya terpenuhi. Kendala utama terletak pada kurangnya komunikasi antar pelaksana, yang memicu tumpang tindih pekerjaan, serta adanya gugatan masyarakat terkait tanah yang digunakan untuk kepentingan pemerintah. Selain itu, pada pelaksanaan hibah masih ditemui hambatan akibat panjangnya proses rekomendasi dari DPRD.
--	--	--	--	--	---

14 Alinda rahmawati kusuma dewi, Agustina prativi nugraheni Pengelolaa n aset/ barang milik daerah di dinas tenaga kerja kota magelang 2018/2019 (Jurnal Ilmiah MEA) 2020	Pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang menunjukkan hasil yang cukup baik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyusunan daftar pertanyaan, survei, wawancara dengan pihak terkait, serta observasi langsung di lapangan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai mekanisme pengelolaan aset yang berlangsung.	Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengelolaan aset/ barang milik daerah di dinas tenaga kerja kota magelang 2018/2019	Pengelolaa n aset/ barang milik daerah di dinas tenaga kerja kota magelang 2018/2019	Metode Penelitian Mengguna kan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan aset telah dilaksanakan secara maksimal dan tertib sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Aspek- aspek utama pengelolaan seperti pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, serta penghapusan barang milik daerah telah berjalan dengan baik dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Setiap aset telah didokumentasika n dengan kodefikasi yang jelas, sehingga memudahkan proses pemantauan dan pelaporan. Selain itu, pihak pengelola juga berupaya
--	--	---	---	---	--

Hasil menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan aset telah dilaksanakan secara maksimal dan tertib sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Aspek-aspek utama pengelolaan seperti pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, serta penghapusan barang milik daerah telah berjalan dengan baik dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Setiap aset telah didokumentasikan dengan kodefikasi yang jelas, sehingga memudahkan proses pemantauan dan pelaporan. Selain itu, pihak pengelola juga berupaya menjaga keteraturan administrasi				menjaga keteraturan administrasi melalui sistem pencatatan yang terstruktur. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, khususnya pada aspek pengadaan barang. Dalam praktiknya, pengadaan tidak selalu dilakukan secara rutin setiap tahun, bahkan pada periode tertentu tidak ada kegiatan pengadaan sama sekali. Hal ini berpotensi memengaruhi ketersediaan barang untuk mendukung operasional, meskipun secara keseluruhan kebutuhan instansi masih dapat terpenuhi dari aset yang
--	--	--	--	---

	melalui sistem pencatatan yang terstruktur. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, khususnya pada aspek pengadaan barang. Dalam praktiknya, pengadaan tidak selalu dilakukan secara rutin setiap tahun, bahkan pada periode tertentu tidak ada kegiatan pengadaan sama sekali. Hal ini berpotensi memengaruhi ketersediaan barang untuk mendukung operasional, meskipun secara keseluruhan kebutuhan instansi masih dapat terpenuhi dari aset yang tersedia.				tersedia
--	--	--	--	--	----------

15. Eseoghene Kokogho, Prince ss Eloho Odio , Olakojo Yusuff Ogunsola , Mark Osemedua Nwaozomudoh Transforming Public Sector Accountability: The Critical Role of Integrated Financial and Inventory Management Systems in Ensuring Transparency and Efficiency (International Journal of Management and Organizational Research) 2024	Integrated Financial and Inventory Management Systems (IFIMS) berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sektor publik. Melalui integrasi manajemen keuangan dan inventaris, sistem ini memungkinkan pelacakan aset, anggaran, dan pengeluaran secara real- time, sehingga dapat mencegah kecurangan, mengurangi kesalahan, serta mengoptimalka n pemanfaatan aset. IFIMS juga mendukung peningkatan kualitas	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi s Transformasi Akuntabilit as Sektor Publik: Peran Penting Sistem Manajemen Keuangan dan Inventaris Terpadu dalam Memastikan Transparan si dan Efisiensi	Transformasi Akuntabilit as Sektor Publik Peran Penting Sistem Manajemen Keuangan dan Inventaris Terpadu dalam Memastikan Transparan si dan Efisiensi	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integrated Financial and Inventory Management Systems (IFIMS) berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional di sektor publik. Sistem ini memungkinka n pelacakan aset, anggaran, dan pengeluaran secara real- time sehingga dapat meminimalka n kesalahan, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kualitas pelaporan dan audit keuangan. Melalui
--	--	---	---	---	--

	pelaporan, audit, serta memperlancar pengambilan keputusan dan perencanaan strategis pemerintah. Meskipun menghadapi tantangan berupa kebutuhan pelatihan, resistensi perubahan, dan investasi awal yang besar, hambatan tersebut dapat diatasi melalui perencanaan bertahap dan keterlibatan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, IFIMS merupakan solusi strategis modernisasi manajemen sektor publik yang mendukung digitalisasi, memperkuat				integrasi manajemen keuangan dan inventaris, IFIMS membantu optimalisasi pemanfaatan aset, mengurangi pemborosan, dan memperlancar proses pengambilan keputusan. Meskipun penerapannya menghadapi tantangan berupa kebutuhan pelatihan, resistensi terhadap perubahan, dan investasi awal yang besar, hambatan tersebut dapat diatasi melalui perencanaan matang, implementasi bertahap, serta
--	---	--	--	--	---

	tata kelola, serta membangun kepercayaan masyarakat				keterlibatan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, IFIMS merupakan solusi strategis untuk modernisasi manajemen sektor publik, mendukung digitalisasi, memperkuat tata kelola, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
--	---	--	--	--	--

16. Fadel Kurniawan ,Achmad Lutfi Optimizatio n Strategies for Governmen t Fixed Assets: A Literature Review (JOURNAL LA SOCIALE) 2025	Aset tetap merupakan sumber daya penting pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024 sebagai dasar pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan aset pemerintah serta merumuskan strategi optimalisasi. Hasil menunjukkan bahwa	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Optimasi Aset Tetap Pemerintah: Tinjauan Literatur	Strategi Optimasi Aset Tetap Pemerintah Tinjauan Literatur	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan aset tetap pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain regulasi yang belum jelas terkait penilaian dan tarif sewa aset, keterbatasan kapasitas SDM, minimnya anggaran, lemahnya perencanaan jangka panjang, kurangnya pengawasan, serta koordinasi yang tidak optimal antar instansi maupun dengan pihak eksternal. Untuk mengoptimalkan nilai aset, pemerintah perlu melakukan identifikasi aset yang komprehensif, menyusun perencanaan strategis yang mempertimbangkan
--	---	---	--	---	--

	tantangan yang masih dihadapi meliputi: regulasi yang belum jelas dalam penilaian dan penetapan harga sewa, keterbatasan kapasitas SDM, perencanaan jangka panjang yang kurang matang, pembiayaan yang belum optimal, lemahnya pengawasan, serta koordinasi antar lembaga yang masih terbatas. Untuk mencapai optimalisasi, diperlukan identifikasi aset yang kuat, perencanaan strategis sesuai kebutuhan pemerintah, evaluasi kinerja aset, serta kolaborasi				n kebutuhan dan kapasitas, meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat pengawasan, serta membangun kerja sama dengan sektor swasta. Optimalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
--	---	--	--	--	--

	dengan sektor swasta. Optimalisasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.				
--	---	--	--	--	--

17. Hilman Arif Prasetya, Tia Subekti Political Will Pemerintah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Journal of Governance and Policy (JGP) 2025	Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji political will Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik berbasis website di BKAD dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BKAD telah mematuhi regulasi, membentuk PPID pelaksana, dan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Political Will Pemerintah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang	Political Will Pemerintah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di BKAD Kota Malang lebih banyak didorong oleh kepatuhan terhadap regulasi (UU No.14/2008 dan Perwali No.50/2010), tanpa adanya langkah proaktif. BKAD hanya berperan sebatas mengunggah dan memelihara informasi di website, sementara kewenangan teknis berada di Diskominfo. Tidak ada komitmen tertulis, alokasi sumber daya
---	---	--	--	---	--

	memanfaatkan website sebagai media informasi, implementasinya belum optimal. Hal ini terlihat dari ketiadaan aturan turunan, alokasi anggaran, ruang partisipasi publik, serta komitmen tertulis. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran pegawai juga menjadi kendala. Diperlukan komitmen berkelanjutan dan integrasi sistem informasi agar keterbukaan informasi publik dapat terwujud secara menyeluruh.				masih terbatas, pembagian peran tidak optimal, serta ketiadaan sanksi memperlemah implementasi. Political will pemerintah tampak ada, namun belum cukup kuat untuk mendorong pengelolaan dan pengembangan website secara optimal, sehingga keterbukaan informasi publik belum berjalan maksimal.
--	--	--	--	--	---

18. Patience Okpeke Paul , Jane Osareme Ogugua and Nsiong Louis Eyo- Udo Innovations in fixed asset management: Enhancing efficiency through advanced tracking and maintenance systems International Journal of Science and Technology Research Archive (IJSTRA) 2024	dampak transformatif dari sistem pelacakan dan pemeliharaan canggih terhadap efisiensi organisasi dan praktik manajemen aset. Penelitian ini menelaah inovasi teknologi utama seperti RFID, GPS, integrasi IoT, pemeliharaan prediktif berbasis AI, dan platform CMMS. Teknologi- teknologi tersebut memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengurangi waktu henti (downtime), mengoptimalkan pemanfaatan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Inovasi dalam manajemen aset tetap: Meningkatkan efisiensi melalui sistem pelacakan dan pemeliharaan sistem	Inovasi dalam manajemen aset tetap Meningkatkan efisiensi melalui sistem pelacakan dan pemeliharaan sistem	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan penerapan teknologi pelacakan dan pemeliharaan canggih seperti RFID, GPS, IoT, AI, dan CMMS mampu meningkatkan efisiensi operasional serta manajemen aset dengan mengurangi downtime, mengoptimalkan penggunaan aset, memperbaiki manajemen siklus hidup, dan meningkatkan akurasi pelacakan. Namun, implementasi teknologi ini masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas teknis,
--	---	---	--	---	---

aset, memperbaiki manajemen siklus hidup, serta memastikan pelacakan dan pelaporan yang akurat. Meskipun memberikan banyak manfaat, penerapan sistem ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kompleksitas teknis, investasi awal yang besar, serta masalah keamanan dan privasi data. Namun, kemajuan dalam AI dan machine learning menawarkan peluang untuk mengatasi tantangan tersebut dengan memprediksi				kebutuhan investasi awal yang besar, serta isu keamanan dan privasi data. Meski demikian, kemajuan AI dan machine learning memberikan peluang untuk mengatasi kendala tersebut melalui prediksi kegagalan aset dan optimalisasi jadwal pemeliharaan
---	--	--	--	--

	kegagalan aset dan mengoptimalka n jadwal pemeliharaan				
--	--	--	--	--	--

19. Anita1, Samsinar, Nuraisyiah3 Analisis akuntansi pertanggungja waban dalam penilaian kinerja pusat biaya pada badan pengelola keungan dan aset daerah kabupaten sinjai (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Perbankan) 2024	Akuntansi pertanggungja waban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai dianalisis melalui Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2022 dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa struktur organisasi telah tersusun dengan baik, laporan pertanggungja waban yang membandingk an anggaran dan realisasi disusun secara tepat, serta	Penelitian bertujuan untuk Menganalisis akuntansi pertanggungja waban dalam penilaian kinerja pusat biaya pada badan pengelola keungan dan aset daerah kabupaten sinjai	Analisis akuntansi pertanggungja waban dalam penilaian kinerja pusat biaya pada badan pengelola keungan dan aset daerah kabupaten sinjai	Metode Penelitian Menggun akan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntansi pertanggungja waban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai dinilai sudah memadai. Hal ini terlihat dari struktur organisasi yang jelas berdasarkan fungsi dan tugas pokok, serta laporan pertanggungja waban yang membandingka n anggaran dengan realisasi disusun dengan baik melalui klasifikasi kode rekening dan penggolongan biaya, tanpa adanya penyimpangan.
--	---	--	--	---	---

	tidak ditemukan penyimpangan. Penilaian kinerja pusat biaya berjalan efektif melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi, meskipun penggolongan akun biaya belum sepenuhnya didasarkan pada pusat biaya.				Pusat biaya dijalankan sesuai anggaran, baik yang terealisasi penuh maupun tidak seluruhnya, namun program kerja tetap terlaksana dengan baik. Pengelolaan pendapatan dan pembiayaan juga telah sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Selain itu, penerapan sistem penghargaan (rewards) dan sanksi (punishment) memperkuat efektivitas penilaian kinerja pusat biaya di BPKAD Kabupaten Sinjai
--	--	--	--	--	---

20. Muhammad FiqihSamudera Wardhana,Taur an Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya Jurnal Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial 2025	Pelaporan kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawab an instansi pemerintah kepada pemerintah pusat atas pencapaian kinerja tahunan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah, termasuk perangkat daerah, diwajibkan menerapkan SAKIP. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang terperinci mengenai implementasi SAKIP. bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas	Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya Pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Metode Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukk n bahwa Hasil penelitian menunjukk n bahwa komunikasi efektif, ketersediaan sumber daya, komitmen pegawai, serta struktur birokrasi yang jelas berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan SAKIP. Namun, masih terdapat kendala berupa informasi laporan yang kurang lengkap, rotasi pegawai yang cepat, serta keterbatasan
--	---	---	--	--	---

	Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan menggunakan model implementasi Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian kualitatif digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi berupa komitmen dan pemahaman positif, serta struktur birokrasi yang terorganisir mendukung keberhasilan implementasi SAKIP. Namun,				pemahaman teknis dalam penyusunan laporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SAKIP sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya manusia dan pemahaman kebijakan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pegawai dan optimalisasi sistem informasi untuk efektivitas yang lebih baik.
--	---	--	--	--	---

	masih terdapat kendala pada penyajian informasi yang kurang lengkap sehingga menurunkan kualitas pelaporan.				
--	---	--	--	--	--

,

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pembagian tugas pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Surabaya?
2	Bagaimana proses pencatatan aset tetap dilakukan di BPKAD kota Surabaya sesuai peraturan pemendagri 47 tahun 2021?
3	Apakah BPKAD Kota Surabaya menggunakan sistem atau aplikasi untuk mengelola aset? Jika iya, bagaimana membantu akuntabilitas?
4	Bagaimana cara BPKAD memastikan bahwa setiap aset memiliki data yang lengkap dan benar?
5	Bagaimana mekanisme pelaporan aset dari SKPD ke BPKAD Kota Surabaya berdasarkan peraturan pemendagri 47 tahun 2021?
6	Bagaimana proses penyusunan rencana kebutuhan aset dilakukan setiap tahun berdasarkan Pemendagri 19 Tahun 2016?
7	Bagaimana BPKAD Kota Surabaya memeriksa atau menilai kebutuhan aset yang diusulkan oleh SKPD?
8	Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan aset dilakukan oleh BPKAD Kota Surabaya?
9	Berdasarkan Permendagri 47 Tahun 2021,Seberapa sering dilakukan pengecekan atau pemeriksaan fisik aset?)
10	Bagaimana proses evaluasi data aset setelah dilakukan pengecekan lapangan?
11	Bagaimana proses rekonsiliasi data aset antara SKPD dan BPKAD Kota Surabaya dilakukan?
12	Kendala apa yang biasanya sering dihadapi BPKAD Kota Surabaya dalam pencatatan dan pelaporan aset?
13	Berdasarkan Permendagri 47 Tahun 2021 Apa saja kesulitan yang sering terjadi saat melakukan pengecekan fisik aset?
14	Berdasarkan Permendagri 7 Tahun 2024 Hal apa saja yang mendukung kelancaran pengelolaan aset di BPKAD?
15	Menurut Bapak, apa yang bisa diperbaiki untuk membuat pengelolaan aset di BPKAD Kota Surabaya? lebih akuntabel ke depannya?

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Pertanyaan	Hasil
1. Bagaimana pembagian tugas pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Surabaya?	Pengelolaan aset tetap : pengelolaan barang ada di sekretaris daerah kota Surabaya, jadi pak sekda selaku pengelola barang mendelegasi tugas, membantu mengelola barang milik daerah ke kepala BPKAD. BPKAD selaku sebagai perangkat daerah ini juga sebagai pembantu pengelola barang milik daerah otomatis setiap tahun terkait dengan kegiatan dengan pengelolaan milik daerah yaitu dikordinasikan oleh BPKAD, dimulai dari perencanaan (setap awal tahun menyurati OPD membuat rencana mereka untuk tahun kedepan) selanjutnya setelah OPD merencanakan akan kami telaah mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai, yang sesuai akan kami majukan jadi setiap perencanaan dari OPD akan kami buat surat Keputusan sekretaris daerah terkait dengan perencanaan tersebut. Hasil verifikasi dari perencanaan OPD tersebut akan masuk dalam tahap selanjutnya yaitu penganggaran, penganggaran sendiri bukan di bidang BPKAD tapi di bidang anggaran akan tetapi tetap satu rumah di BPKAD , jadi di penganggaran ini secara garis besar mereka akan mengelola data yang sudah kita verifikasi terkait dengan rencana kebutuhan OPD tadi mereka akan mengelola data tersebut untuk direalisasikan. Banyak macam ada anggaran ,priorotas kebutuhan setelah penganggran selesai apa saja yang disetujui pada saat di penganggran itu akan masuk langsung ke aplikasi Delivery jadi delivery semua permintaan ,anggaran masuk di situ setelah di realisasikan kita menarik hasil realisasi tersebut kita masuk ke aplikasi kita bernama Sistem Manajemen Milik Daerah (SIMBADA) untuk di registasi.
2. Bagaimana proses pencatatan aset tetap dilakukan di BPKAD kota Surabaya sesuai peraturan	Proses pencatatan aset tetap itu yang dimaksud yang melakukan bukan BPKAD tapi OPD . Pengelola Barang- BPKAD (Selaku pembantu pengelola barang) OPD. Jadi tidak dilakukan oleh BPKAD tetapi perangkat daerah yang merealisasikan anggaran yang disetujui mereka mencatat aset tetap, jadi proses pencatatan di catat di aplikasi SIMBADA. Dalam pencatatan barang para OPD kita tetap sebagai pembantu pengelola punya tugas fungsi sebagai mengawasi

pemendagri 47 tahun 2021?	apa yang dicatat sudah sesuai dengan rekening belanja modalnya pengawasannya khusus di bidang kami P3BMD punya 9 orang pengawas, 3 orang programmer, 3 orang administrasi, mengkolek data itu tugas fungsinya dalam pencatatan aset tetap ini mengontrol apa yang dilakukan OPD apa sudah sesuai dengan misalnya mereka ingin belanja seperti di kelurahan ada dana kelurahan membelanjakan biayanya untuk perbaikan paving, saluran setelah melakukan pekerjaan tersebut otomatis pekerjaan tersebut harus di catat di SIMBADA jadi kelurahan melalui kecamatan harus mencatat pekerjaan yang sudah selesai dan BPKAD mengawasi pencatatannya misalnya secara anggaran atau belanja sudah sesuai dengan yang dianggarkan.
3. Apakah BPKAD Kota Surabaya menggunakan sistem atau aplikasi untuk mengelola aset? Jika iya, bagaimana membantu akuntabilitas? 8. Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan aset dilakukan oleh BPKAD Kota Surabaya?	Berhubungan dengan no 8 dan 9. Yang mengelola aset itu Adalah SIMBADA Cuma BPKAD di bidang P3BMD ini punya 6 sistem yang berkaitan satu sama lain yaitu ERKBMD ini untuk system rencana kebutuhan barang milik daerah, karena anggaran bukan di bidang P3BMD jadi dibidang anggaran (E-Budgeting) setelah itu ke delivery yang juga bukan di bidang P3BMD baru setelah itu ke SIMBADA terus SIMBADA juga kebetulan beberapa turunan opsi dari system SIMBADA terkait dengan pertama Teknik Penghapusan jadi setelah aset secara permendagri punya umur manfaat lalu di perwali 10 nomor 2016 di atur berapa tahun manfaat umur aset jadi kadang pada saat mendekati masa umur manfaat ada yang rusak maka yang rusak ini perlu di hapus kita di bantu denga aplikasi SIPGAD setelah ada Namanya aplikasi E-Simcout ini aplikasi yang mengambil data dari SIMBADA yang di khususkan untuk pemeliharaan kendaraan seperti komsumsi bahan bakar setiap OPD. Karena di Permendagri tidak ada acuan kami mengacu pada Perpres no 72 tahun 2025 jadi kendaraan dinas di perpes terebut roda 4 di batasi pemeliharaan (service,bahan bakar) 36 juta setiap tahun, roda 24,9 juta (bahan bakar dan service). E-Simcout selain untuk memantau pemeliharaan kendaraan dan service juga sebagai memantau terkait dengan pajak kendaraan bermotor (bayar pajak dan perpanjangan pajak).

4. Bagaimana cara BPKAD memastikan bahwa setiap aset memiliki data yang lengkap dan benar?	Salah satu caranya sama berkaitan dengan inventarisasi karena dilakukan dengan cara berkelanjutan 5 tahun sekali ini juga salah satu cara sebagai pembantu pengelolaan aset daerah sudah sesuai dengan mereka yang masukan dengan aplikasi SIMBADA. Karena setiap tahun perangkat daerah itu OPD punya belanja modal budget yang harus mereka registrasikan karena mereka sudah terbantu dengan sistem tadi nah sebenarnya kami sebagai penyelia aset jalan satu-satunya memastikan bahwa apa yang mereka regitrasikan di SIMBADA itu sesuai atau tidak dengan cara inventarisasi . registernya lebih dari 2 juta aset kami melakukan tidak langsung dalam setahun itu secara menyeluruh melakukan secara bertahap mana yang bisa dilakukan dan selesai pada tahun itu (turun ke lapangan).
5. Bagaimana mekanisme pelaporan aset dari SKPD ke BPKAD Kota Surabaya berdasarkan peraturan pemendagri 47 tahun 2021? 11. Bagaimana proses rekonsiliasi data aset antara SKPD dan BPKAD Kota Surabaya dilakukan?	Berhubungan dengan no 11. Jadi pelaporan aset dilakukan akhir tahun anggaran tujuannya untuk memenuhi akuntabilitas dari pemerintah kota surabaya sendiri yang dimana laporan aset dilakukan secara berkelanjutan dan diperiksa oleh BPK itu diperiksa setiap tahun. BPK biasanya datang di pemerintah 1 tahun 2-4 kali untuk melakukan audit . mekanisme pelaporan aset dari SKPD ke BPKAD ini jadi lewat aplikasi SIMBADA. Setelah anggaran itu terealisasi tugas dari pengguna barang tugasnya mendaftari anggaran tadi di sistem SIMBADA otomatis hasil salah satu dari tadi masuk dalam pelaporan aset, setiap perangkat daerah setiap tahun wajib melaporkan laporan keuangan mereka. Tugas BPKAD adalah mengkolek hasil laporan tiap-tiap perangkat daerah untuk dijadikan satu, jadi kita punya 61 perangkat daerah kita kolekmjadikan satu nantinya menjadi laporan pemerintah kota surabaya disajikan ke BPK yang rutin meminta itu adalah BPK (dari tahun 2004). KPK sudah mulai masuk tapi yang diminta mirip-mirip data dengan BPK. KPK tidak rutin permintaan data mereka juga tidak diketahui. Mekanisme pelaporan aset sebenarnya setiap tahun kebanyakan perangkat daerah transaksi, setiap perangkat daerah punya saldo isinya aset-aset setaip tahun pelaoran paling besar memperngaruhi saldo adalah belanja modal yang sudah diregistrasikan.

6. Bagaimana proses penyusunan rencana kebutuhan aset dilakukan setiap tahun berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016?	Setiap OPD setiap tahunnya biasanya punya transaksi-transaksi yang dilakukan dan di catat di SIMBADA sebagian besar OPD yang dicatat di SIMBADA lebih banyak ke registrasi ke belanja modal karena setiap tahun ada registrasi belanja modal. Untuk rekonsiliasi datanya biasanya kami mengundang secara berkala OPD-OPD ini untuk menamai dengan Des, RKBMD kami lakukan di awal tahun kami melakukan perangkat-perangkat daerah untuk melalui des, mengajukan pengusulan permintaan kebutuhan kami proses kami memferifikasi, menolak, menerima permintaan kebutuhan tersebut dengan melakukan des.
7. Bagaimana BPKAD Kota Surabaya memeriksa atau menilai kebutuhan aset yang diusulkan oleh SKPD?	Berhubungan dengan no 7. Setiap tahun RKBMD setiap tahun di permendagri ada timeline di terakhir di bulan juni/mei biasanya di akhir tahun atau awal kita sudah membuat edaran ke dinas-dinas untuk melakukan entry RKBMD biasanya kita kasih waktu 1 bulan lebih kemudian di bulan febuari kita lakukan Des kita panggil OPD nya kita tanyain usulannya dia dan sesuaikan dengan perpres no 72 tahun 2025 kalau misalkan melebihi kita tanyakan dan cocokan dengan aset yang sudah ada .setelah itu kita telaah apakah bisa di terima atau tidak setelah itu kita proses untuk pembuatan sk nya. Untuk rencanya nya ada di kita untuk pengadaannya dan realisasinya ada masing-masing OPD atau mungkin di BPJAB (Bagian Pengadaan Barang Jasa Administrasi Pembangunan) bersifat kota RKBMD semua aplikasi di onlinekan, setiap OPD kami kasih akun-akunya . sebenarnya pengawasan dalam aset itu sebenarnya melekat pada pengguna barang jadi perangkat daerah yang punya komputer tv dll merlakukan pengawasan itu. Kami mengawasinya melalui aplikasi SIMBADA
9. Berdasarkan Permendagri 47 Tahun 2021, Seberapa sering dilakukan	Terkait pemeriksaan fisik aset itu di permendagri namanya inventarisasi aset secara garis besar mengecek keberadaan aset di setiap OPD mulai dari KIP A (Aset Tanah), KIP B (Aset Peralatan dan Mesin) KIP C (Aset Gedung dan Bangunan) KIP D (Aset irigasi jaringan), KIP E (Aset Tetap Lainnya) KIP F (Konstruksi dalam pengerjaan) contohnya pemkot

pengecekan atau pemeriksaan fisik aset?	melakukan pembangunan fisik yang tidak selesai dalam 1 tahun anggaran misalnya 2025 tidak selesai dan selesai di tahun 2026 maka masuk dalam KIP F walaupun fisik nya sudah jadi mereka masuk dalam KIP D . Setiap aset yang belum selesai kita masukan KIP F. Jadi terkait dengan pengecekan dan pemeriksaan fisik ini biasanya melakukan inventarisasi atau sensus selam 5 tahun sekali dari KIP A – KIP F. Karena tahapan pengecekannya misalnya tahun ini mengecek KIP A tahun berikutnya KIP B karena kendalanya sudah teralu banyak register yang ada di SIMBADA jadi setiap barang itu registernya sendiri- sendiri jadi itu yang membedakan agar aset tidak tertukar, karena register ada 2 juta rouw dimana excel tidak bisa menampung maka dari melakukan survei tidak bisa langsung jadi bertahap . Amanah permendagri setiap 5 tahun di survei peralatan mesin kami banyak, tanah kami ada sekitar 9 ribuan, gedung bangunan sekitar 18 ribu register. Pengecekan dilakukan dengan amanah Permendagri 5 tahun sekali. E-SIPGAD (Sistem Informasi Pengelolaan Gudang) mengacu pada SIMBADA memfasilitasi aset-aset yang sudah rusak dan akan dilakukan penjualan sistemnya aset yang punya nilai di lelang dan sekiranya aset yang tidak punya nilai di usulkan untuk dijual barang-barang yang ingin dijual kami membuat surat yang diajukan kepada KPKNL selaku lembaga penilai untuk menilai jumlah barang yang sudah rusak untuk dilelang. Biasanya jumlah angka dari barang-barang tersebut dimasukan dalam KPKNL dan masyarakat bisa melihat atau mengaksesnya. Lelang dilakukan 3 kali jika tidak laku.
10. Bagaimana proses evaluasi data aset setelah dilakukan pengecekan lapangan?	Saat pengguna barang atau OPD meregistrasikan aset mereka di SIMBADA maka aset merka terbaca secara kondisi baik . sesuai dengan form permendagri harus ada kondisi terkait kondisi aset tersebut seperti BAIK,KURANG BAIK,RUSAK BERAT. Jadi misalnya aset yang direregistrasikan di SIMBADA tergolong baik istilahnya baru masuk dalam app SIMBADA saat kami melakukan inventarisasi biasanya tidak berangkat sendirian tetapi secara tim dalam tim salah satunya ada perangkat daerah atau pengguna barang yang kami survei

	asetnya misalnya ditemukan di perangkat daerah tersebut secara masa umur manfaat itu sudah lebih akan tetapi tetapi asetnya masih bisa digunakan, tidak semua barang-barang tersedia di daerah, maka dari itu masih menggunakan aset lama karena umur aset masih baik. Maka pengguna barang menyesuaikan dengan kondisi tersebut.
12. Kendala apa yang biasanya sering dihadapi BPKAD Kota Surabaya dalam pencatatan dan pelaporan aset?	Bukan hanya pencatatan. Bahwasanya adanya EBMD bisa hilang atau tidak lengkap datanya jika dipindahkan dalam app SIMBADA . EBMD dibangun setelah SIMBADA kami bangun selesai dan melalui berbagai proses Sinkronisasi data, data yang kami akses itu dalam jumlah besar, lemot, dan servernya down ada pada perangkat yang kami gunakan, kami memberikan akun kepada setiap perangkat daerah otomatis kendalanya pada saat sistem itu diakses dalam jumlah besar sekaligus dan sistem jadi lemot, servernya down kalau awal periode membuka anggaran baru itu biasanya setelah kami menerima opini dari BPK pemeriksaan baru kami buka pembukaan anggaran baru biasanya bulan juni-oktober masih belum padat dan mulai padat pada bulan desember mendekati penutupan lalu perangkat daerah harus mengonsep laporan keuangan menyajikan angkanya sudah sesuai kendalanya di situ sistem jadi down karena banyak yang mengakses. Biasanya kendalanya terkait dengan SDM (Sumber Daya Manusia) ada yang gampang untuk di koordinasi, gampang memahami apa yang harus dilakukan dan ada yang agak lama dan jadi kendala.
13. Berdasarkan Permendagri 47 Tahun 2021 Apa saja kesulitan yang sering terjadi saat melakukan pengecekan fisik aset?	Pada saat kita memeriksa aset tetapi fisik asetnya tidak ditemukan, kurangnya kepedulian dan rasa awarnessnya karena ketidakpedulian terhadap aset sering sekali ditemukan fisik aset tidak ada karena juga sebenarnya mungkin kesulitan itu bisa jadi karena tidak ada rasa peduli dan rasa aware.
14. Berdasarkan	Yang mendukung itu karena semakin banyak kami membuat laporan pertanggungjawaban ada yang bentuknya laporan

Permendagri 7 Tahun 2024 Hal apa saja yang mendukung kelancaran pengelolaan aset di BPKAD?	keuangan ada yang permintaan data ke instansi-instansi di luar pemerintahan kota surabaya kami biasanya pertanggungjawab melaporkan untuk diperiksa BPK , dan KPK sendiri dengan kegiatan mereka yaitu MCP (Monitoring Center for Prevention) program KPK untuk pencegahan korupsi. Ada juga permintaan data yang diminta rutin oleh kementrian dalam negeri OPD ini akan bingung untuk menyajikan data pada periode BPK mau masuk mereka bingung data apa saja yang disajikan waktu permintaan data itu setiap kalau dari mendagri 3 bulan sampai 1 semester sekali semua perangat daerah yang dulunya itu tidak peduli maka mereka jadi aware termasuk kepala OPD dan bawahan OPD nya ini lah jadi kelancaran berlangsungnya.
15. Menurut Bapak, apa yang bisa diperbaiki untuk membuat pengelolaan aset di BPKAD Kota Surabaya? lebih akuntabel ke depannya?	Pertama dari sisi SDM dari pengurus barang bukan orang pilihan pertama karena banyak memilih jadi bagian keuangan dan bendahara karena dirasa lebih ringan daripada dibagian barang mungkin secara beban kerja secara tanggung jawab. Terkait sumber daya manusia, yang harus diperbaiki terkait dengan perangkat yang kami gunakan karena sistem di pemerintah kota surabaya 90% berbasis elektronik otomatis kami juga mengakui ada saatnya perangkat kami tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami ma, secara perangkat masih ada perbaikan karena pada saat sistem itu di akses banyak orang dalam sewaktu-waktu serevernya down karena perangkatnya kurang mumpuni.

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAS) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN (S1)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S2)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI (S3)

TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5931800 Ext 140, 141, E-mail: feb@untas-sby.ac.id

Nomor : 2297/K/FEB/X/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Untuk Mengadakan Penelitian**
Kepada : Yth. Bapak/Ibu Pimpinan BADAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD) di Surabaya.
Jl. Walikota MustajabKetabang, Genteng, Surabaya

Dengan hormat,

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (S1), maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan Skripsi sebagai hasil penerapan pelajaran teori serta praktek yang diperoleh berdasarkan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak / Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama : MOCH IQBAL ROMADHON
N. P. M : 1222200080
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis / S1 Akuntansi
Alamat : Jl jojoran baru 4 no 60
Telp./HP. 08816364427

Guna melakukan penelitian pada :
BADAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) di
Surabaya
untuk memperoleh data sesuai dengan Skripsi yang sedang disusunnya dengan judul
"ANALISIS PEMENUHAN AKUNTABILITAS BADAN PENGELOLAAN DAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA SURABAYA DALAM
PENGELOLAAN ASET TETAP"

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Surabaya, 07/10/2025
Prof. Dr. Iri Ratnawati, MS. Ak. CA, CPA
NPP. 20220.85.0043

Lampiran 6 Surat Telah selesai Penelitian

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Jimerto No. 25 - 27 Lantai 2-3 Surabaya 60272
Telepon. (031) 5312144 Pesawat. 140, 213 Faksimile. (031) 5353782
Laman surabaya.go.id, Pos-el: bpkad@surabaya.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9/18646/436.8.2/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINA HERMAJANTI SE, M.Si

NIP : 197204031999032007

Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I / IV-b

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan Surat dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Nomor :
2297/K/FEB/X/2025 tanggal 07 Oktober 2025, perihal Permohonan Ijin Untuk Mengadakan
Penelitian, menerangkan bahwa:

NAMA : MOCH IQBAL ROMADHON**NPM : 1222200080****MAHASISWA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Surabaya terkait Analisis Pemenuhan Akuntabilitas Badan Pengelolaan
Dan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Surabaya Dalam Pengelolaaan Aset Tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 NOV 2025
RINA HERMAJANTI SE, M.Si
Kepala Badan
Sekretaris,

RINA HERMAJANTI SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 197204031999032007

Lampiran 7 Hasil Turnitin

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET TETAP PEMERINTAH
DAERAH STUDI KASUS BPKAD KOTA SURABAYA-1.docx

ORIGINALITY REPORT

18%	17%	9%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.pusdiklatpemda.com	2%
	Internet Source	
2	elar.urfu.ru	2%
	Internet Source	
3	ejurnal.stie-trianandra.ac.id	2%
	Internet Source	
4	eprints.iain-surakarta.ac.id	1%
	Internet Source	
5	padangjurnal.web.id	1%
	Internet Source	
6	Submitted to Universitas Airlangga	1%
	Student Paper	
7	ulilalbabinstitute.co.id	1%
	Internet Source	
8	ejournal.poltekbaubau.ac.id	1%
	Internet Source	
9	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	1%
	Student Paper	
10	Submitted to Universitas Papua	1%
	Student Paper	
11	journal.ipm2kpe.or.id	1%
	Internet Source	
12	internationalpublisher.id	

	Internet Source	<1 %
13	Dewi Sutra, Ilham Wahyudi, Ratih Kusumastuti. "ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016 PADA PEMERINTAH KOTA JAMBI", <i>Jambi Accounting Review (JAR)</i> , 2022 Publication	<1 %
14	idoc.pub Internet Source	<1 %
15	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.tanamonews.com Internet Source	<1 %
17	eprints.poltektegal.ac.id Internet Source	<1 %
18	jurnal.fkip.uns.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
20	Deissy Mokodompit, Jenny Morasa, Jessy Warongan. "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu", <i>JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"</i> , 2017 Publication	<1 %
21	Dendi Putra Adriyan, Fitri Eriyanti. "Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam Manajemen Kegiatan Job Fair (Pameran Kesempatan Kerja)", <i>YASIN</i> , 2025 Publication	<1 %

22	moam.info Internet Source	<1 %
23	www.neliti.com Internet Source	<1 %
24	www.scribd.com Internet Source	<1 %
25	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude assignment template Off
Exclude matches Off

Lampiran 8 Bukti LOA



UNIVERSITAS 45 SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI
 JURUSAN : MANAJEMEN & AKUNTANSI (STATUS TERAKREDITASI)
 Komplek Gedung Juang 45 Jatim, Jl. Mayjen Sungkono Surabaya
 Telp. 081-6535-759 (WA), 081-8353-050 (SMS)



SURAT KETERANGAN PENERBITAN JURNAL

Nomor : 5.1.14/016/FE/XII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ir. Achmad Daengs GS, SE., MM., CPPM., CPE., Dipl.SM
 Jabatan : Pemimpin Redaksi Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi (JUMMA45)

Menerangkan bahwa Saudara :

Nama : **Moch Iqbal Romadhon, Muhammad Taufiq Hidayat**
Universitas 17 Agustus 1945

Telah menyerahkan artikel yang layak untuk dipublikasikan

Judul Artikel :

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS BPKAD KOTA SURABAYA

Yang akan diterbitkan di Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi (JUMMA45)
Volume 5 No. 1, April 2026, e-issn 2828-7118 (online,) p-issn 2828-7207 (print)

Telah dicek melalui aplikasi Turnitin dan memenuhi syarat untuk diterbitkan.
 Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan
 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Desember 2025
 Pemimpin Redaksi (ABDIMAS45)

Dr. Ir. Achmad Daengs GS, SE., MM., CPPM., CPE., Dipl.SM
 NIRA.991510710161004814023

Lampiran 9 Kartu Bimbingan

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5931800 Pst 140&141 E-mail : feb@untag-sby.ac.id

SEMESTER
Gasal/ Genap
2025 / 2026

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa / NBI : MOCH IBRAHIM ROMADHON, 1222000000

Nama Pembimbing : Dr. Muhammad Taufiq Hidayat SE.MM

Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Dalam Pengelolaan Aset Tetap

Mulai Program Skripsi : Semester Thn. Ak. Selesai Bimbingan Tanggal

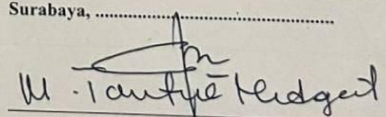
No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1.	Rabu, 10-9-2025	Judul	AAC	
2.	Jumab, 26-9-2025	Mapping	Revisi	
3.	Jumab, 02-10-2025	Mapping	AAC	
4.	Jumab, 10-10-2025	Proposisi	Revisi	
5.	Kamis, 16-10-2025	Proposisi	AAC	
6.	Rabu, 25-11-2025	Bab IV + V	Revisi	
7.	Jumab, 28-11-2025	IV + V	Revisi	
8.	Jumab, 2-12-2025	IV + V	AAC	
9.	Kamis, 2-12-2025	IV + V	Aktualisasi	

Perpanjang I

Semester :

Th. Ak. :

Paraf Kujur :

Surabaya,

 (Nama dan tanda tangan Pembimbing)